

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG BIAK

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Biak Audited TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dyuwaraninda Rachardono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	7
II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	9
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11
IV. NERACA	12
V. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN	13
LAMPIRAN 1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA	20
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LO	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LPE	23
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	23
LAMPIRAN 2 INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA	26
A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU	26
B. INFORMASI PENTING LAINNYA	27
LAMPIRAN 3 CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN	30
LAMPIRAN 4 TELAAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	33

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BIAK JALAN MAJAPAHIT NOMOR 1; 98117 TELEPON (0981) 21444, 26111;
FAKSIMILE (0981) 26466; POS-EL (E-MAIL) kpknbiak@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dyuwaraninda Rachardono

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Audited TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,778,165,377, atau mencapai 80% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp2,223,264,000. Realisasi Belanja Negara pada Audited TA 2025 adalah sebesar Rp1,570,598,20 atau mencapai 77% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,043,606,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per Audited TA 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp5,386,210,624 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp30,000 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp5,386,180,624. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,503,500 dan Rp5,384,707,124.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,776,679,377 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp1,655,673,114 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp121,006,263.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1,486,000, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp122,492,263.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5,420,096,401. Surplus-LO adalah sebesar Rp122,492,263. Terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp157,881,540 sehingga terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp35,389,277. Sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5,384,707,124.

5. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak Audited Tahun 2025 dilampiri dengan catatan atas laporan keuangan (CALK), informasi keuangan tertentu, dan informasi penting lainnya serta data capaian output per fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK 525474

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,223,264,000	1,778,165,377	(445,098,623)	80	1,384,020,000	1,537,731,481	(153,711,481)	111
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,223,264,000	1,778,165,377	(445,098,623)	80	1,384,020,000	1,537,731,481	(153,711,481)	111
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,223,264,000	1,778,165,377	(445,098,623)	80	1,384,020,000	1,537,731,481	(153,711,481)	111
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,043,606,000	1,570,598,205	(473,007,795)	77	1,830,025,000	1,673,851,247	156,173,753	91
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,703,606,000	1,400,823,705	(302,782,295)	82	1,799,126,000	1,643,018,947	156,107,053	91
3. Belanja Modal	340,000,000	169,774,500	(170,225,500)	50	30,899,000	30,832,300	66,700	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK 525474

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,043,606,000	1,570,598,205	(473,007,795)	77	1,830,025,000	1,673,851,247	156,173,753	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Biak, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DYUWARANINDA RACHARDONO
NIP 197702021997031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,776,679,377	1,537,731,481	238,947,896	15.539
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,776,679,377	1,537,731,481	238,947,896	15.539
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,776,679,377	1,537,731,481	238,947,896	15.539
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	56,007,009	136,901,825	(80,894,816)	(59.09)
Beban Barang dan Jasa	767,596,425	845,205,464	(77,609,039)	(9.182)
Beban Pemeliharaan	139,577,440	180,265,792	(40,688,352)	(22.571)
Beban Perjalanan Dinas	437,944,831	508,159,791	(70,214,960)	(13.817)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	254,547,409	270,939,705	(16,392,296)	(6.05)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,655,673,114	1,941,472,577	(285,799,463)	(14.721)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	121,006,263	(403,741,096)	524,747,359	(129.97 1)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,486,000	0	1,486,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,486,000	0	1,486,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,486,000	0	1,486,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	122,492,263	(403,741,096)	526,233,359	(130.33 9)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	122,492,263	(403,741,096)	526,233,359	(130.33 9)

Keterangan :
FINAL

Biak, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DYUWARANINDA RACHARDONO
NIP 197702021997031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,420,096,401	5,672,098,981	(252,002,580)	(4.44)
SURPLUS/DEFISIT-LO	122,492,263	(403,741,096)	526,233,359	(130.34)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(157,881,540)	151,738,516	(309,620,056)	(204.05)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(35,389,277)	(252,002,580)	216,613,303	(85.96)
EKUITAS AKHIR	5,384,707,124	5,420,096,401	(35,389,277)	(0.65)

Keterangan :

FINAL

Biak, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DYUWARANINDA RACHARDONO

NIP 197702021997031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (525474) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BIAK

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	30,000	1,501,000	(1,471,000)	(98.00)
JUMLAH ASET LANCAR	30,000	1,501,000	(1,471,000)	(98.00)
ASET TETAP				
Tanah	2,613,536,000	2,613,536,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,184,190,789	3,049,043,596	135,147,193	4.43
Gedung dan Bangunan	3,176,179,760	3,176,179,760	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,587,725,925)	(3,414,981,523)	(172,744,402)	5.06
JUMLAH ASET TETAP	5,386,180,624	5,423,777,833	(37,597,209)	(0.69)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	114,960,007	264,930,714	(149,970,707)	(56.61)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(114,960,007)	(264,930,714)	149,970,707	(56.61)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	5,386,210,624	5,425,278,833	(39,068,209)	(0.72)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,503,500	5,182,432	(3,678,932)	(70.99)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,503,500	5,182,432	(3,678,932)	(70.99)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,503,500	5,182,432	(3,678,932)	(70.99)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,384,707,124	5,420,096,401	(35,389,277)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	5,384,707,124	5,420,096,401	(35,389,277)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	5,384,707,124	5,420,096,401	(35,389,277)	(0.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,386,210,624	5,425,278,833	(39,068,209)	(0.72)

Keterangan :

FINAL

Biak, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DYUWARANINDA RACHARDONO
NIP 197702021997031002

V. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN 1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

2. Profil Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Majapahit No.1, Biak Numfor, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.1/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku memiliki unit pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak.

3. Pendekatan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

4. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian

- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- c. Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset
- Aset Lancar
 - Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Aset Lainnya
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
 - Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas
- f. Kewajiban
 - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- h. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

i. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

j. Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Biak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	840.240.000	840.240.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	18.684.000	18.684.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.364.340.000	1.364.340.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain		-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		-
Jumlah Pendapatan	2.223.264.000	2.223.264.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.653.716.000	1.703.606.000
Belanja Modal	170.000.000	340.000.000
Jumlah Belanja	1.823.716.000	2.043.606.000

Terdapat penambahan pagu belanja barang sebesar Rp49.890.000 dan belanja modal sebesar Rp170.000.000 pada Triwulan IV 2025.

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.778.165.377 atau mencapai 80% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.223.264.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.486.000	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	840.240.000	978.050.333	116%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.684.000	24.181.818	129%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.364.340.000	772.412.226	57%
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.535.000	0%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Jumlah	2.223.264.000	1.778.165.377	80%

Pada Tahun 2025 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I sebesar Rp978.050.333. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pegadaian sebesar Rp772.412.226 dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp24.181.818. Pendapatan anggaran lain-lain berasal dari penyetoran dana mengendap sebesar Rp1.535.000. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN berupa peralatan dan mesin (barang inventaris) sebesar Rp1.486.000. Sementara itu, pendapatan jasa lainnya berasal dari biaya penggantian kutipan lelang sebesar Rp500.000.

2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.570.589.205 atau 77% dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp2.043.606.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.703.606.000	1.400.823.705	82%
Belanja Modal	340.000.000	169.774.500	50%
Total Belanja Kotor	2.043.606.000	1.570.598.205	77%
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	2.043.606.000	1.570.598.205	77%

Realisasi Belanja Tahun 2025 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.400.823.705 atau 82% dari pagu anggaran sebesar Rp1.703.606.000 dan Belanja Modal sebesar Rp169.774.500 atau 50% dari pagu anggaran sebesar Rp340.000.000. Baik Realisasi Belanja Barang maupun Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan blokir anggaran pada TA 2025.

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	82,23%	91,32%	-9,09%
Belanja Modal	49,93%	99,78%	-49,85%
Jumlah	76,85%	91,47%	-14,62%

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai TA 2025 sama dengan TA 2024, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 9,09% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan blokir anggaran yang diberlakukan pada tahun anggaran 2025.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan 49,85% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan blokir anggaran pada TA 2025 sebesar 50% dari pagu belanja modal.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya merupakan pendapatan operasional meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain yaitu total sebesar Rp1.776.679.377 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos LRA.

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp56.007.009. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah beban persediaan konsumsi sebesar Rp47.702.989 dan beban persediaan bahan pemeliharaan sebesar Rp8.304.020.

3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp767.596.425. Rincian Beban Persediaan Barang dan Jasa adalah beban keperluan perkantoran sebesar Rp534.493.636, beban penambah daya tahan tubuh sebesar Rp44.967.138, beban pengiriman surat dinas tagihan pos sebesar Rp11.966.600, beban honor operasional satuan kerja sebesar Rp90.168.000, beban operasional lainnya sebesar Rp44.662.924, beban bahan sebesar Rp19.780.000, beban non operasional lainnya sebesar Rp 2.776.500, beban peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp3.668.377, beban langganan jasa telepon sebesar Rp13.011.250, dan beban jasa profesi sebesar Rp1.800.000.

4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp139,577,440 yang berasal dari beban pemeliharaan peralatan dan mesin.

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah sebesar Rp437,944,831 yang berasal dari beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp368,576,831 dan beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp69,368,000.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp254,547,409. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

7. Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1,486,000 yang berasal dari pemindahtanganan BMN berupa inventaris

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.420.096.401.

2. Surplus/Defisit-LO

Pada Tahun 2025 terdapat surplus LO sebesar Rp122.492.263.

3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas adalah selisih antara saldo akun yang ditagihkan ke entitas lain dan saldo akun diterima dari entitas lain ditambah dengan transaksi masuk atau dikurangi dengan transaksi keluar. Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp(157.881.540).

4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Merupakan selisih antara Surplus LO dan Transaksi Antar Entitas yaitu sebesar Rp(35,389,277).

5. Ekuitas Akhir

Merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas yaitu sebesar Rp5,384,707,124.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas berasal dari bea materai yang belum disetorkan ke perum peruri oleh bendahara penerimaan sebesar Rp30.000.

2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah adalah sebesar Rp2.613.536.000 yang berasal dari 3 NUP tanah dengan luas total yaitu 2.879 m2.

3. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah pada TA sebesar Rp3.184.190.789. Sementara itu nilai pada TA 2024 adalah sebesar Rp3.049.043.596 atau mengalami kenaikan sebesar Rp135.147.193 dengan rincian:

Saldo Awal	3.049.043.596
Mutasi tambah:	
Pembelian	216.950.200
Transfer Masuk	169.774.500
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan	47.175.700
Saldo per 30 Juni 2025	3.184.190.789

4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.176.179.760 yang merupakan 9 Rumah Negara dan Pagar Permanen.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp3.587.725.925. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.613.536.000	-	2.613.536.000
Peralatan dan Mesin	3.184.190.789	(2.862.652.318)	321.538.471
Gedung dan Bangunan	3.176.179.760	(725.073.607)	2.451.106.153
Akumulasi Penyusutan	8.973.906.549	-3.587.725.925	5.386.180.624

6. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp114.960.007. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp114.960.007. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

8. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.503.500. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Nominal tersebut berasal dari bea materai yang belum dipindahbukukan ke peruri sebesar Rp30.000 dan belanja yang masih harus dibayar berupa tagihan pos bulan desember sejumlah Rp1.473.500.

9. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.384.707.124. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

LAMPIRAN 2 INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA**A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU****1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025****a. Informasi Realisasi Belanja**

Satker: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak (dalam rupiah)

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	-	1.703.606.000	340.000.000	2.043.606.000
B. Realisasi s.d. 31 Des 2025	-	1.400.823.705	169.774.500	1.570.598.205
C. % Realisasi s.d. 31 Des 2025 (B / A)	-	82,22%	49,93%	76,85%
D. Pagu Blokir	-	199.011.000	170.000.000	369.011.000
E. % Realisasi Setelah Memperhitungkan Pagu Blokir (B / (A - D))	-	93,10%	99,86%	93,78%
F. Trajectory IKPA	-	90,00%	90,00%	-

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Biak sebesar Rp1.570.598.205 (76,85%). Apabila pagu blokir dikecualikan, realisasi Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Biak adalah sebesar 93,78%. Realisasi belanja, baik belanja barang maupun belanja modal, sudah di atas *trajectory* IKPA yaitu sebesar 90%.

b. Informasi Sisa Pagu/Pagu Minus Belanja Pegawai Serta Rencana Mitigasi

Sehubungan dengan implementasi *Back-Office* Terintegrasi (BOT) di Kementerian Keuangan, alokasi anggaran belanja pegawai disentralisasikan ke Unit Eselon I Sekretariat Jenderal (untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja) dan ke Kantor Pusat DJKN (untuk belanja uang makan dan uang lembur), sehingga tidak terdapat alokasi belanja pegawai maupun pagu minus belanja pegawai pada Satker KPKNL Biak.

c. Informasi Pagu Blokir

Satker: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak (dalam rupiah)

Akun	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Bulan
A	B	C	D	E	F
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	1.703.606.000	199.011.000	-	-
53	Belanja Modal	340.000.000	170.000.000	-	-
	Jumlah				

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat sisa pagu yang masih diblokir sebesar Rp369.011.000 yaitu sebesar Rp199.011.000 belanja barang dan Rp170.000.000 belanja modal.

Sebagai tambahan informasi pada Triwulan IV 2025 terdapat *top up* penambahan pagu belanja barang sebesar Rp50.000.000 dan belanja modal sebesar Rp170.000.000, serta pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp110.000.

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat kontrak *outstanding* pada KPKNL Biak.

b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat kontrak *outstanding* pada KPKNL Biak.

3. Informasi Progres Likuidasi Entitas Akuntansi TA 2025

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat Likuidasi pada KPKNL Biak.

b. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset Dan Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat Likuidasi pada KPKNL Biak.

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Kondisi

Tidak terdapat kondisi khusus yang terjadi pada KPKNL Biak. Tidak terdapat reorganisasi, tidak ada pergantian pimpinan, tidak ada pelimpahan atau penerimaan aset hasil likuidasi, dll.

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Pada Tahun 2025 terdapat target Program Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru yakni Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan adalah sebanyak 45 output rekomendasi. Namun pada bulan Oktober terdapat penambahan target pada program tersebut menjadi 259.

Satker: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak (dalam rupiah)

No.	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran Setelah Blokir (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (Rp)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Rincian Output
A	B	C	D	E	$F (E / C \times 100\%)$	G	H	$I (H / G \times 100\%)$
1	4798.UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	18.864.000	6,793,500	89,02%	259 Rekomendasi	259 Rekomendasi	100%

3. Kondisi Keuangan Yang Memerlukan Perhatian Khusus

a. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1) Pendapatan Negara dan Hibah

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B – C)	E (D / C x 100%)
PNBP Lainnya	1.778.165.377	1.537.731.481	240.433.893	15,63%

Kenaikan realisasi PNPB Lainnya disebabkan oleh kenaikan realisasi Bea Lelang Pegadaian dibanding Audited 2024.

2) Belanja Negara

Tidak terdapat akun-akun yang mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan dibanding dengan periode sebelumnya.

b. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Neraca

1) Aset

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B – C)	E (D / C x 100%)
Kas Lainnya dan Setara Kas	30.000	1.501.000	(1.471.000)	(98.00%)

Nominal di atas merupakan Dana Pihak Ketiga yang Belum Dipindahbukukan berupa Uang Jaminan Lelang yang belum diambil pada di Bendahara Penerimaan.

Selain itu, di bawah ini adalah daftar BMN yang kondisinya Rusak Berat:

Satker: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jenis Aset	Nilai Aset Rusak Berat Per 31 Des 2025	Rencana Tindak Lanjut Aset Rusak Berat	Nilai Henti Guna Per 31 Des 2025	Rencana Tindak Lanjut Setelah Henti Guna	Nilai Usul Hapus Per 31 Des 2025	Tahapan/ Progress Usul Hapus
Tanah	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	0 (Buku)	Penjualan	0 (Buku)	Penjualan	1.486.000 (Limit)	Penjualan dan Penghapusan
Gedung/Bangunan	-	-	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Jumlah						

Pada tahun 2025 terdapat penjualan BMN Rusak Berat dengan usulan nilai limit yaitu Rp1.486.000 dan laku terjual secara lelang sebesar Rp1.486.000.

2) Kewajiban

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B – C)	E (D / C x 100%)
Utang kepada Pihak Ketiga	1.503.500	5.182.432	26.068.568	503%

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Nominal tersebut berasal dari bea materai yang belum dipindahbukukan ke peruri sebesar Rp30.000 dan belanja yang masih harus dibayar berupa tagihan pos bulan desember sejumlah Rp1.473.500.

3) Ekuitas

Informasi terkait perubahan ekuitas dijelaskan dalam poin (d) di bawah.

c. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Operasional (LO)

1) Pendapatan

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D (B – C)</i>	<i>E (D / C x 100%)</i>
PNBP Lainnya	1.778.165.377	1.537.731.481	240.433.893	15,63%

Kenaikan realisasi PNBP Lainnya disebabkan oleh kenaikan realisasi Bea Lelang Pegadaian dibanding Audited 2024.

2) Beban

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D (B – C)</i>	<i>E (D / C x 100%)</i>
Beban Persediaan	56.007.009	136.901.825	(80.894.816)	(59,09%)
Beban Pemeliharaan	139.577.440	180.265.792	(40.688.352)	(22,57%)
Beban Perjalanan Dinas	437.944.831	508.159.791	(70.214.960)	(13,81%)

Penurunan pada pos Beban disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

d. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian Akun	Realisasi s.d. 31 Des 2025	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D (B – C)</i>	<i>E (D / C x 100%)</i>
Surplus/Defisit -LO	122.492.263	(403.741.096)	526.233.359	130%
Transaksi Antar Entitas	(157.881.540)	151.738.516	(309.620.056)	(204%)

Surplus LO disebabkan oleh penurunan Beban pada Laporan Operasional yang cukup signifikan pada tahun 2025. Sementara penurunan pada Transaksi Antar Entitas disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja karena efisiensi tahun 2025.



TELAAH LAPORAN KEUANGAN LAYER 1 TINGKAT SATKER

NO	Jenis Telaah	Transaksi	Kode Telaah	Nama Telaah	Kode BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	LO	LRA	Selisih
1	LRA VS LO PENDAPATAN				015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK	14	-1.778.165.377	-1.778.165.377	0
2	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA				015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK	14	767.596.425	767.294.425	302.000
3	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS				015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK	14	437.944.831	437.944.831	0



TELAAH LAPORAN KEUANGAN LAYER 1 TINGKAT SATKER

NO	Jenis Telaah	Kode BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Akumulasi Penyusutan Amortisasi Tahun Berjalan	Beban Penyusutan Amortisasi Tahun_Berjalan	Selisih
1	LO VS Neraca Beban Penyusutan vs Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK			86.114.234	167.917.241	-81.803.007
2	LO VS Neraca Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya vs Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK			-149.970.707	0	-149.970.707
3	LO VS Neraca Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan vs Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK			86.630.168	86.630.168	0
4	LO VS Neraca Beban Penyusutan/Amortisasi vs Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Seluruh Jenis Aset Tetap dan Aset Lainnya)	015	01509	525474	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK			22.773.695	254.547.409	-231.773.714